

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo dalam Upaya Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah

Ella Nur Aini ^{1*}, Wilda Zuliasari ², Eva Hany Fanida ³, Melda Fadiyah Hidayat ⁴

^{1, 2, 3, 4}, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

* 25040674332@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya evaluasi kinerja keuangan Pemerintah Kota Probolinggo untuk mendukung optimalisasi pengelolaan aset daerah secara efektif, transparan, dan berkelanjutan guna meningkatkan pelayanan publik serta pendapatan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kinerja keuangan Pemerintah Kota Probolinggo dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui optimalisasi pengelolaan aset daerah. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya penguatan kemandirian fiskal daerah di tengah masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan dokumen resmi terkait selama periode 2021–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja PAD mengalami fluktuasi, yaitu menurun pada tahun 2022 dan kembali meningkat pada tahun 2023. Namun, tingkat kemandirian keuangan daerah masih relatif rendah karena masih didominasi oleh dana transfer dibandingkan pendapatan asli daerah. Selain itu, struktur PAD masih bertumpu pada pajak daerah, sedangkan kontribusi retribusi dan pemanfaatan aset daerah masih belum optimal. Permasalahan utama terletak pada pengelolaan aset daerah yang belum efektif, seperti pemanfaatan yang kurang optimal, administrasi yang belum tertata dengan baik, serta minimnya inovasi dalam pengelolaan aset. Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi pengelolaan aset yang lebih efektif untuk meningkatkan PAD, memperkuat kemandirian fiskal, serta menciptakan struktur pendapatan daerah yang lebih seimbang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi pengelolaan aset daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.

Kata Kunci: *Kinerja Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Pengelolaan Aset Daerah, Kemandirian Keuangan, Pajak Daerah*

Pendahuluan

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah kebijakan penting dalam sistem pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan secara lebih efektif serta mempercepat proses pembangunan di setiap wilayah. Melalui kebijakan desentralisasi, pemerintah pusat memberi wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah agar bisa mengelola dan mengatur urusan daerah sesuai dengan kemampuan serta ciri khas wilayah masing-masing. Kebijakan ini diharapkan bisa membantu daerah agar lebih bisa berdiri sendiri dalam mengelola sumber daya mereka sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Pratommi & Muhsyaf, 2023). Keberhasilan otonomi daerah tidak hanya dilihat dari segi administrasi, tetapi juga dari kemampuan daerah dalam mengelola uang dengan baik, hemat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan (Muttaqin et al., 2023).

Penelitian terdahulu menyatakan bahwa desentralisasi fiskal berdampak signifikan terhadap kemampuan keuangan daerah di Indonesia (Hardiana, 2023; Utari et al., 2023). Salah satu cara penting untuk mengetahui apakah otonomi daerah berhasil adalah melihat sejauh mana daerah itu bisa mandiri secara keuangan (Yaqin et al., 2026). Kemandirian fiskal menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan penelitian dan pengembangan pembangunan serta memenuhi kebutuhan pemerintahan melalui pendapatan yang berasal dari sumber daerah itu sendiri.

Semakin tinggi kemampuan daerah menghasilkan pendapatan sendiri, maka semakin berkurang ketergantungan mereka pada dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal memengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah (Pabayo, 2025). Oleh karena itu, pemerintah daerah harus terus memanfaatkan sumber-sumber pendapatan yang ada agar kemampuan keuangan mereka semakin baik (Perwitasari et al., 2023; Hendra, 2018).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bagian penting dari pendapatan daerah yang menunjukkan kemampuan keuangan daerah tersebut (Trisnasari & Sunaningsih, 2022). PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber pendapatan resmi lainnya. PAD memiliki peran yang sangat penting dalam mendanai pembangunan serta pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Rahman, 2022; Ramadhan, 2019). Semakin tinggi sumbangan PAD, semakin besar kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan dana sendiri. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa kinerja keuangan daerah bisa dilihat dari kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah serta mengelola pendapatan dengan cara yang efisien (Haryanto, 2017).

Salah satu kemungkinan yang bisa diupayakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah dengan mengelola aset daerah secara baik. Aset daerah adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan diperoleh secara resmi, termasuk tanah, bangunan, peralatan, infrastruktur, serta fasilitas lainnya. Aset tersebut tidak hanya digunakan untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat, tetapi juga bisa dimanfaatkan secara ekonomis agar menghasilkan pendapatan. Penggunaan aset bisa dilakukan dengan sistem menyewa, bekerja sama dengan pihak lain, atau mengembangkan usaha di daerah tersebut. Jika dikelola secara baik, aset daerah bisa menjadi sumber pendapatan tambahan dan membantu memperkuat pendapatan daerah (Anasta & Ningsih, 2019; Pratiwi et al., 2025).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah dipengaruhi oleh tingginya ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat serta belum optimalnya penggunaan potensi pendapatan lokal yang dimiliki daerah tersebut (Agustina et al., 2022; Rahma et al., 2026). Sementara itu, penelitian lain menyatakan bahwa hubungan antara dana transfer pusat dan kemandirian daerah masih menjadi masalah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal (Khoirunisa & Sulaeman, 2022). Namun, kedua penelitian tersebut lebih banyak membahas aspek fiskal secara umum dan belum menyoroti pengelolaan aset daerah sebagai strategi peningkatan PAD.

Di tingkat daerah, penelitian mengenai Kota Probolinggo biasanya masih memfokuskan diri pada kontribusi pajak daerah, pendapatan daerah berupa retribusi, atau kondisi keuangan daerah secara keseluruhan. Penelitian yang menghubungkan kemampuan keuangan daerah dengan pemanfaatan aset secara optimal masih tergolong sedikit. Padahal, aset daerah

memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan alternatif yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap pajak maupun dana transfer dari pusat. Oleh karena itu, masih ada ruang untuk penelitian lebih lanjut, yaitu belum ada penelitian yang secara menyeluruh membahas hubungan antara kinerja keuangan daerah dan strategi penggunaan aset.

Kota Probolinggo merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Timur yang memiliki berbagai aset yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut. Menurut laporan keuangan pemerintah daerah, PAD Kota Probolinggo pada tahun 2021 mencapai Rp212,84 miliar, tahun 2022 sebesar Rp191,57 miliar, dan tahun 2023 sebesar Rp209,77 miliar. Data tersebut menunjukkan bahwa pendapatan daerah mengalami perubahan setiap tahunnya, sehingga dibutuhkan strategi yang mampu memperkuat sumber pendapatan daerah agar lebih stabil dan berkelanjutan.

Kebaruan penelitian ini terdapat pada pengaitan antara hasil keuangan Pemerintah Kota Probolinggo pada tahun 2021 hingga 2023 dengan pemanfaatan yang maksimal terhadap pengelolaan aset daerah sebagai langkah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Penelitian ini tidak hanya mengevaluasi rasio keuangan daerah, tetapi juga memperhatikan bagaimana potensi aset daerah dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemandirian fiskal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Probolinggo dalam mengelola pendapatan daerah serta bagaimana upaya pemerintah daerah dalam memaksimalkan penggunaan aset daerah sebagai sumber peningkatan PAD. Tujuan penelitian ini adalah mempelajari bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Probolinggo berjalan, serta mengeksplorasi peran penting dari pengelolaan aset daerah yang optimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan memperkuat kemandirian keuangan daerah.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif diambil dengan jenis penelitian studi kasus untuk menyelidiki kinerja keuangan dari Pemerintah Kota Probolinggo dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan aset daerah sebagai sarana untuk meningkatkan PAD. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk memahami dengan lebih mendalam mengenai pengelolaan keuangan daerah, tidak hanya melalui angka-angka keuangan, tetapi juga melalui analisis dinamika antar elemen pendapatan daerah, tingkat kemandirian fiskal, efektivitas manajemen pendapatan, dan penggunaan aset daerah. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang menyeluruh, dengan fokus pada pemaknaan fenomena yang diteliti secara menyeluruh. Di sisi lain, studi kasus diterapkan karena penelitian menekankan pada suatu objek spesifik, yakni Pemerintah Kota Probolinggo, sehingga analisis bisa dilakukan dengan mendalam, kontekstual, dan sesuai dengan karakteristik daerah yang menjadi subjek penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen resmi dan sumber lainnya, termasuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Probolinggo dari tahun 2021 hingga 2023, laporan PAD, data pendapatan transfer, laporan pengelolaan aset daerah, serta dokumen lain yang relevan dengan kinerja keuangan daerah. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan berbagai referensi seperti jurnal ilmiah, buku, peraturan, dan hasil penelitian sebelumnya sebagai dasar teoritis dan bahan perbandingan dalam analisis. Penggunaan data sekunder dipilih karena sifat data tersebut yang resmi, terdokumentasi, dan mampu memberikan gambaran yang objektif tentang kondisi keuangan daerah yang menjadi fokus penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi pustaka. Studi dokumentasi melibatkan pengumpulan, penelaahan, pencatatan, dan penginventarisasian dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan subjek penelitian. Setiap dokumen dianalisis sesuai dengan kebutuhan penelitian, khususnya yang berhubungan dengan pertumbuhan PAD, rasio kemandirian keuangan daerah, efektivitas pendapatan daerah, kontribusi pajak dan retribusi, serta pengelolaan aset daerah. Di sisi lain, studi pustaka dilakukan dengan mengkaji teori-teori dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan untuk memperkuat dasar konseptual penelitian. Melalui kedua teknik ini, data yang diperoleh meliputi tidak hanya informasi kuantitatif dari laporan keuangan, tetapi juga pemahaman konseptual yang mendukung interpretasi hasil penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menerapkan model analisis interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih data yang relevan, menyederhanakan informasi, dan mengelompokkan data sesuai dengan indikator penelitian. Setelah itu, data disajikan dalam bentuk naratif deskriptif untuk memudahkan analisis hubungan antara kinerja keuangan dan pengelolaan aset daerah. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi yang sistematis, yang menghasilkan gambaran komprehensif mengenai kondisi keuangan daerah serta potensi optimalisasi aset daerah untuk meningkatkan PAD.

Penelitian ini menggunakan beberapa indikator kinerja keuangan, yaitu pertumbuhan PAD, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, kontribusi pajak daerah untuk PAD, dan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD. Indikator-indikator tersebut digunakan untuk menilai kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan, tingkat ketergantungan terhadap dana transfer, efektivitas pencapaian target pendapatan, serta struktur sumber penerimaan daerah. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji pengelolaan aset daerah sebagai salah satu kemungkinan untuk meningkatkan PAD, terutama terkait dengan pemanfaatan aset, efektivitas pengelolaan, dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah.

Studi ini menerapkan teknik triangulasi sumber. Proses triangulasi dilakukan dengan membandingkan sejumlah data yang diambil dari beberapa dokumen resmi guna memastikan konsistensi informasi. Pada tahap awal, data terkait realisasi Pendapatan Asli Daerah untuk tahun 2021–2023 dikonfirmasi dengan membandingkan Laporan Realisasi Anggaran dan dokumen pendapatan daerah untuk memeriksa kesesuaian angka, tren pertumbuhan, dan tingkat realisasi yang dipakai dalam analisis. Langkah ini diambil agar data PAD yang digunakan benar-benar tepat dan dapat mendukung perhitungan rasio serta interpretasi kinerja keuangan daerah.

Triangulasi juga diterapkan pada data pendapatan transfer dengan membandingkan informasi yang ada dalam LRA serta dokumen APBD dan laporan pendapatan daerah lainnya. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa nilai transfer yang digunakan dalam perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah sesuai dengan data resmi. Setelah itu, dilakukan pengecekan kembali melalui perhitungan rasio secara independen untuk menguji keselarasan antara data dasar dan hasil analisis rasio dalam penelitian. Proses triangulasi berikutnya dilaksanakan pada data kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD. Pada tahap ini, data dari laporan pajak daerah serta laporan retribusi dibandingkan dengan data yang terdapat dalam LRA untuk melihat apakah jumlah penerimaan dan persentase kontribusinya terhadap total PAD sudah sesuai. Apabila ditemukan perbedaan, dilakukan pemeriksaan silang terhadap sumber data yang ada untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan tetap valid.

Langkah ini sangat penting karena pajak dan retribusi merupakan elemen utama dalam analisis struktur pendapatan daerah.

Triangulasi juga diterapkan dalam analisis pengelolaan aset daerah. Data tentang pemanfaatan aset, kondisi pengelolaan, dan kontribusi aset terhadap pendapatan daerah dibandingkan antara dokumen aset daerah dengan sumber pustaka dan penelitian sebelumnya. Dengan langkah ini, penelitian tidak hanya mengandalkan satu sumber informasi, tetapi juga menguji kesesuaian temuan empiris dengan perspektif teoritis. Dengan demikian, analisis tentang optimalisasi aset daerah memiliki dasar yang lebih kuat secara empiris dan teoritis. Penelitian ini juga menerapkan triangulasi teori dengan membandingkan hasil temuan penelitian dengan konsep-konsep terkait kinerja keuangan daerah, otonomi fiskal, dan pengelolaan aset daerah. Hasil penelitian dianalisis melalui berbagai perspektif teori agar hasilnya tidak hanya didasarkan pada data empiris, tetapi juga mendapatkan penguatan konseptual. Pendekatan ini membantu memperjelas hubungan antara kondisi di lapangan dengan teori-teori yang relevan serta memperkuat argumen dari hasil penelitian.

Penelitian ini ditujukan pada periode 2021–2023 karena rentang waktu tersebut dinilai mampu menggambarkan perkembangan kondisi keuangan daerah secara lebih terkini, termasuk dinamika pertumbuhan PAD, tingkat kemandirian fiskal, efektivitas pendapatan daerah, dan kemajuan dalam pengelolaan aset daerah. Pemilihan periode ini juga memperhatikan ketersediaan data yang lengkap dan relevan untuk memenuhi kebutuhan penelitian. Dengan menggunakan periode tiga tahun, penelitian dapat mengidentifikasi pola perubahan, tren, serta dinamika kinerja keuangan daerah secara lebih jelas. Melalui metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang mendalam mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kota Probolinggo serta hubungan antara optimalisasi pengelolaan aset daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, metode yang diambil diharapkan dapat menghasilkan analisis yang sistematis, valid, dan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian pengelolaan keuangan daerah.

Hasil

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengetahui kemampuan daerah, terutama dalam membantu mewujudkan otonomi daerah dan mendanai pembangunan secara mandiri. PAD mencerminkan tingkat kemandirian keuangan suatu daerah, dimana semakin besar kontribusi PAD maka semakin kecil ketergantungan daerah tersebut pada dana yang diberikan oleh pemerintah pusat, oleh karena itu menganalisis pertumbuhan PAD sangat penting untuk memahami seberapa baik pemerintah daerah dalam mengelola potensi ekonomi yang ada.

Perkembangan hasil PAD diketahui menggunakan data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah kota Probolinggo tahun 2021-2023 yang tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021-2023

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Presentase%
2021	216.826.743.325	212.846.009.771	98,17%
2022	221.286.566.585	191.579.662.537	86,59%
2023	198.177.764.901	209.779.956.402	105,85%

Berdasarkan Tabel 1, realisasi PAD Kota Probolinggo selama periode 2021–2023 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2021, realisasi PAD mencapai

Rp212,84 miliar dari target sebesar Rp216,82 miliar atau sebesar 98,17%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa target PAD hampir sepenuhnya tercapai. Pada tahun 2022, realisasi PAD mengalami penurunan menjadi Rp191,57 miliar dari target Rp221,28 miliar atau sebesar 86,59%. Dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi penurunan nominal realisasi PAD sebesar Rp21,27 miliar. Selain itu, tingkat pencapaian target juga menurun cukup signifikan. Selanjutnya pada tahun 2023, realisasi PAD meningkat menjadi Rp209,77 miliar dan melampaui target sebesar Rp198,17 miliar. Tingkat pencapaian pada tahun tersebut mencapai 105,85%, sehingga menunjukkan bahwa realisasi PAD melebihi target yang telah ditetapkan. Dibandingkan tahun 2022, terjadi kenaikan realisasi PAD sebesar Rp18,20 miliar. Jika dilihat secara keseluruhan, nilai realisasi PAD tertinggi terjadi pada tahun 2021, sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2022. Sementara itu, tingkat pencapaian target tertinggi terjadi pada tahun 2023 karena mampu melampaui target pendapatan.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan dengan menggunakan PAD tanpa harus bergantung pada dana bantuan dari pemerintah pusat. Rasio ini menjadi penanda penting dalam mengevaluasi sejauh mana otonomi daerah berhasil dijalankan, karena menunjukkan kemampuan daerah dalam mencari pendapatan sendiri secara mandiri.

Semakin besar rasio kemandirian, semakin rendah tingkat ketergantungan pada dana transfer. Jika rasio tersebut kecil, maka menunjukkan bahwa struktur keuangan daerah masih bergantung banyak pada bantuan dari luar.

Tabel 2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021-2023

Tahun	PAD	Pendapatan Transfer	Rasio Kemandirian %
2021	212.846.009.771	757.985.129.405	28,08%
2022	191.579.662.537	763.451.570.000	25,09%
2023	209.779.956.402	758.853.156.765	27,64%

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 2, tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Probolinggo dalam periode 2021 hingga 2023 masih tergolong rendah dan belum menunjukkan kondisi yang stabil. Pada tahun 2021, rasio kemandirian mencapai 28,08%, yang menunjukkan bahwa kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pemerintahan masih terbatas, karena mayoritas sumber pendapatan berasal dari dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa sumbangan PAD terhadap total pendapatan masih tergolong kecil dibandingkan dengan bantuan dari luar.

Pada tahun 2022, tingkat kemandirian turun menjadi 25,09%. Penurunan ini terjadi karena realisasi PAD turun, sedangkan pendapatan transfer tetap tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan Pemerintah Kota Probolinggo terhadap pemerintah pusat semakin besar. Penurunan ini juga menunjukkan adanya kesulitan dalam mengelola sumber pendapatan daerah, seperti kurangnya efisiensi dalam mengumpulkan pajak daerah, rendahnya sumbangan dari retribusi, serta belum maksimalnya pengembangan potensi ekonomi lokal.

Rasio kemandirian meningkat pada tahun 2023 menjadi 27,64%. Peningkatan ini dipicu oleh meningkatnya realisasi pendapatan asli daerah yang bahkan berhasil melebihi target yang telah ditentukan. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan pendapatan daerah semakin baik, baik dalam hal pengumpulan pendapatan maupun tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, kenaikan tersebut belum cukup besar untuk mengubah secara menyeluruh struktur keuangan daerah, karena sebagian besar pendapatan masih berasal dari dana transfer.

Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD

Pajak daerah adalah bagian penting dari PAD yang berperan besar dalam membiayai pembangunan daerah. Tingginya sumbangan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu memaksimalkan potensi ekonomi yang ada dengan sistem pengumpulan pajak yang efektif.

Tabel 3. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD kota Probolinggo Tahun 2021-2023

Tahun	Pajak Daerah	PAD	Kontribusi%
2021	94.029.000.000	212.846.009.771	44,17%
2022	95.043.025.115	191.579.662.537	49,61%
2023	100.429.219.278	209.779.956.402	47,87%

Berdasarkan Tabel 3, kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Probolinggo selama tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan bahwa pajak daerah adalah yang paling dominan dalam struktur pendapatan daerah. Pada tahun 2021, pajak daerah menyumbang 44,17%, yang berarti hampir separuh dari total PAD berasal dari sektor ini. Hal ini menandakan peran penting pajak daerah dalam menopang keuangan daerah.

Sumbangan pajak daerah pada tahun 2022 meningkat menjadi 49,61%. Kenaikan ini terjadi meskipun total PAD mengalami penurunan. Ini menunjukkan bahwa pajak daerah tetap menjadi sumber pendapatan yang cukup stabil dibandingkan dengan elemen PAD lainnya. Dengan kata lain, saat pendapatan lain mengalami penurunan, pajak daerah masih mampu menyumbang secara signifikan.

Sumbangan pajak daerah pada tahun 2023 tercatat 47,87%. Walaupun mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, angka ini masih tergolong tinggi dan menunjukkan bahwa pajak daerah tetap menjadi sumber utama PAD. Penurunan persentase tersebut bukan disebabkan oleh penurunan penerimaan pajak, tetapi karena adanya peningkatan dari komponen PAD lainnya yang turut menyumbang pada total pendapatan daerah. Kontribusi yang besar dari pajak daerah menunjukkan bahwa struktur PAD Kota Probolinggo masih sangat tergantung pada sektor ini. Hal ini memiliki dua sisi, yaitu sebagai kekuatan dan juga potensi risiko. Di satu sisi, pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang cukup stabil dan dapat diandalkan. Namun, di sisi lain, ketergantungan yang terlalu besar pada pajak daerah bisa menciptakan risiko jika terjadi penurunan ekonomi, yang akan berdampak langsung pada penerimaan pajak.

Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD

Retribusi daerah adalah salah satu bagian dari PAD dan biasanya sumbangannya tidak terlalu besar dibandingkan dengan pajak daerah. Meskipun begitu, retribusi masih membantu mendukung pendapatan daerah, terutama dari layanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.

Tabel 4. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Kota Probolinggo Tahun 2021-2023

Tahun	Retribusi Daerah	PAD	Kontribusi%
2021	11.272.831.046	212.846.009.771	5,29%
2022	12.206.734.204	191.579.662.537	6,37%
2023	12.202.736.308	209.779.956.402	5,82%

Berdasarkan Tabel 4, kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Probolinggo selama tiga tahun terakhir terlihat masih kecil dan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Misalnya di tahun 2021, kontribusinya hanya sekitar 5,29 persen. Artinya, dari semua pendapatan yang diperoleh daerah sendiri, bagian yang berasal dari retribusi masih

sangat terbatas. Pada tahun 2022, ada sedikit peningkatan menjadi 6,37%. Tapi jika dilihat lebih jauh, kenaikan ini belum menunjukkan perubahan yang terasa nyata. Retribusi masih memiliki peran yang kecil dibandingkan pajak daerah yang jauh lebih besar pengaruhnya. Jadi meskipun ada kenaikan, dampaknya terhadap total PAD masih belum terasa signifikan. Pada tahun 2023, kontribusinya malah menurun sedikit menjadi 5,82%. Penurunan ini bukan karena retribusi mengalami penurunan, melainkan karena pendapatan daerah secara keseluruhan meningkat, sehingga bagian dari retribusi terlihat lebih kecil. Ini menunjukkan bahwa retribusi belum bisa mengejar pertumbuhan komponen PAD yang lainnya.

Pembahasan

Pengelolaan Aset Daerah

Aset daerah adalah komponen penting dalam struktur keuangan pemerintah daerah yang memiliki peran strategis, tidak hanya dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik, tetapi juga sebagai sumber potensial PAD. Aset daerah mencakup berbagai jenis kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah, seperti tanah, bangunan, pasar, terminal, fasilitas umum, dan aset lainnya yang memiliki nilai ekonomi jika dikelola dengan baik. Dalam konteks Kota Probolinggo, berdasarkan data Pendapatan Asli Daerah tahun 2021 hingga 2023, pendapatan yang berasal dari pengelolaan aset daerah belum menjadi sumber utama bagi pendapatan daerah tersebut. Struktur PAD masih didominasi oleh pajak daerah, sedangkan retribusi dan hasil pengelolaan aset masih tergolong rendah.

Kondisi itu menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi dari kekayaan daerah belum digunakan dengan baik. Ini menunjukkan ada perbedaan antara kemampuan daerah dalam memiliki aset dan cara mereka memanfaatkan aset tersebut untuk menghasilkan pendapatan. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa aset daerah memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi untuk membantu meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi biasanya belum dimanfaatkan dengan baik, sehingga kontribusinya masih bersifat terbatas (Majid, 2025). Seiring dengan itu, penelitian lainnya menjelaskan bahwa rendahnya kontribusi aset terhadap pendapatan asli daerah biasanya disebabkan oleh kurangnya keefektifan dalam mengelola aset daerah, baik dalam hal perencanaan, penggunaan, maupun pengawasan (Ridhoi, 2023).

Masalah utama dalam pengelolaan aset daerah di Kota Probolinggo adalah masih banyak aset yang belum digunakan secara efektif. Beberapa aset seperti tanah, bangunan, pasar, terminal, serta fasilitas umum masih digunakan secara terbatas, bahkan ada aset yang belum digunakan sama sekali. Kondisi ini menunjukkan bahwa aset-aset tersebut tidak digunakan dengan efisien, sehingga seharusnya bisa memberikan manfaat ekonomi bagi daerah tersebut. Jika aset itu dikelola dengan baik melalui kerja sama, sewa, atau pengembangan usaha daerah, maka aset itu bisa menjadi sumber penghasilan yang terus-menerus. Penelitian terdahulu mengatakan bahwa mengelola aset daerah secara optimal dapat meningkatkan manfaat dari aset tersebut sekaligus memberi kontribusi nyata terhadap pendapatan asli daerah (Wulandari et al., 2025). Mengubah aset yang tidak menghasilkan pendapatan menjadi aset yang memiliki nilai ekonomi adalah salah satu cara penting untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Masalah lain yang cukup penting adalah pada bagian pengelolaan aset. Pencatatan aset yang tidak terorganisir dengan baik, data yang belum terpadu dalam satu sistem, serta informasi tentang kondisi aset yang tidak diperbarui menyebabkan proses pengelolannya tidak berjalan dengan optimal. Kondisi ini membuat pemerintah daerah kesulitan dalam

merencanakan, mengawasi, serta mengambil keputusan soal penggunaan aset. Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa cara pengelolaan aset yang tidak rapi bisa menghalangi upaya memaksimalkan manfaat aset daerah, sehingga mengubah sistem pengelolaan aset menjadi bentuk digital dianggap sebagai langkah penting untuk meningkatkan efisiensi serta keterbukaan (Waruwu & Siregar, 2024). Masih ada beberapa aset daerah yang kurang terjaga dengan baik, sehingga menyebabkan penurunan nilai ekonomis serta fungsi dari aset tersebut. Aset yang tidak dirawat akan mengalami penurunan nilai, bahkan dalam jangka waktu yang lama bisa menjadi beban bagi pemerintah daerah karena memerlukan biaya perbaikan yang lebih tinggi dibandingkan manfaat yang diperoleh. Penelitian terdahulu menjelaskan bahwa pengelolaan aset yang tidak dilengkapi dengan perawatan yang memadai akan menyebabkan penurunan nilai manfaat aset secara nyata (Almira & Sukarno, 2024).

Rendahnya pendapatan dari retribusi daerah menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah masih belum berjalan dengan optimal. Banyak objek seperti pasar, terminal, tempat parkir, serta fasilitas umum lainnya termasuk dalam aset daerah yang seharusnya bisa memberi penghasilan secara terus-menerus. Namun, jika pengelolaan aset belum berjalan dengan baik, maka peluang untuk menghasilkan pendapatan dari retribusi juga tidak bisa dimaksimalkan. Hal ini menunjukkan adanya hubungan langsung antara kualitas pengelolaan dengan tingkat penerimaan daerah. Penelitian terdahulu mengatakan bahwa pengelolaan aset daerah secara baik dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah secara positif (Hamdani & Hamzah, 2025). Oleh karena itu, aset daerah tidak hanya digunakan untuk memberikan layanan kepada masyarakat, tetapi juga menjadi alat penting dalam meningkatkan pendapatan keuangan daerah.

Upaya mengoptimalkan aset daerah bisa dilakukan dengan beberapa cara, seperti melakukan inventaris ulang aset secara menyeluruh, mengatur dan mendigitalisasi data aset, memanfaatkan aset yang tidak berproduksi dengan kerja sama pihak luar, menyewakan aset, serta merevitalisasi aset yang tidak digunakan lagi. Selain itu, peningkatan sistem pengawasan juga sangat penting untuk memastikan bahwa aset yang sudah digunakan memberikan manfaat sesuai dengan kemampuannya dalam menghasilkan keuntungan ekonomi.

Pengelolaan aset daerah di Kota Probolinggo masih memiliki potensi yang luar biasa, tetapi belum dimanfaatkan dengan baik. Permasalahan utama terjadi pada bidang penggunaan, pengelolaan, perawatan, dan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan yang komprehensif dalam sistem pengelolaan aset daerah agar aset tersebut bisa memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan asli daerah, memperkuat kemandirian keuangan daerah, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Hubungan Kinerja Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah

Kinerja keuangan Pemerintah Kota Probolinggo selama masa penelitian menunjukkan bahwa sumber utama PAD masih terutama berasal dari pajak daerah. Sementara itu, kontribusi dari retribusi daerah dan pengelolaan aset daerah masih tergolong kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah masih kurang beragam dan belum lepas sepenuhnya dari ketergantungan pada satu sumber pendapatan utama. Ketergantungan yang besar pada pendapatan daerah dari pajak memiliki dampak terhadap kembang-kempisnya keuangan daerah. Jika aktivitas ekonomi masyarakat mengalami penurunan, maka penerimaan pajak juga akan berkurang, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan serta pelayanan publik. Oleh karena itu, memperluas berbagai sumber penghasilan daerah sangat penting untuk mempertahankan keseimbangan keuangan.

Pengelolaan aset daerah berperan penting dalam membantu meningkatkan pendapatan asli daerah. Aset daerah seperti tanah, bangunan, pasar, terminal, dan fasilitas umum lainnya bisa dipakai dengan berbagai cara, seperti menyewakan, bekerja sama dengan pihak ketiga untuk memanfaatkan, atau mengembangkan usaha yang berbasis aset daerah tersebut. Jika dikelola dengan baik, aset tersebut bisa menjadi sumber pendapatan yang konsisten dan berkelanjutan. Namun, di lapangan, kemungkinan itu belum digunakan dengan baik. Masih ada aset yang belum memberikan keuntungan sesuai dengan nilai ekonominya.

Masalah administrasi, kurangnya perawatan, serta pengawasan yang tidak memadai juga menghambat penggunaan optimal aset daerah. Kondisi ini membuat pendapatan daerah tidak beragam dan masih tergantung pada pajak sebagai sumber utamanya. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa pendekatan penelitian yang efektif dapat meningkatkan efisiensi fiskal serta memperkuat struktur pendapatan daerah (Nasution & Rahayu, 2023). Ini menunjukkan bahwa memaksimalkan pengelolaan aset adalah salah satu cara penting untuk memperkuat ketahanan keuangan daerah. Memperbaiki pengelolaan aset bisa meningkatkan pendapatan daerah, sekaligus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Aset yang dikelola dengan baik bisa membantu menyediakan fasilitas umum yang lebih baik, membuat kehidupan masyarakat lebih nyaman, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan adanya usaha-usaha di sekitar aset tersebut.

Penelitian lainnya juga menekankan bahwa pengelolaan daerah yang optimal memiliki dampak positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan (Hamdani & Hamzah, 2025). Dengan demikian, semakin baik pengelolaan aset dilakukan, semakin besar pula kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dan peningkatan kemandirian fiskal daerah. Secara umum, ada kaitan yang kuat antara hasil keuangan daerah dengan cara mengelola aset daerahnya. Meningkatkan nilai aset daerah sangat penting untuk menambah pendapatan daerah, mengurangi ketergantungan pada dana yang diberikan pemerintah pusat, serta memperkuat daya tahan dan kemandirian keuangan Pemerintah Kota Probolinggo secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Probolinggo selama periode 2021–2023 masih belum optimal dalam mendukung kemandirian fiskal daerah. Hal ini terlihat dari struktur PAD yang masih didominasi oleh pajak daerah dengan kontribusi sekitar 44%–49%, sementara kontribusi retribusi daerah dan hasil pengelolaan aset daerah masih tergolong rendah. Rasio kemandirian keuangan daerah yang hanya berada pada kisaran 25%–28% menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat masih cukup tinggi. Meskipun rasio efektivitas PAD pada tahun 2023 mencapai 105,85%, kondisi tersebut belum mampu mencerminkan kemampuan keuangan daerah yang benar-benar mandiri karena belum diimbangi dengan diversifikasi sumber pendapatan yang memadai.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah belum berjalan secara optimal akibat masih adanya aset yang belum dimanfaatkan secara produktif, pencatatan aset yang belum tertata dengan baik, serta kurangnya strategi pemanfaatan aset untuk meningkatkan pendapatan daerah. Akibatnya, kontribusi aset daerah terhadap PAD masih rendah dan struktur pendapatan daerah menjadi kurang seimbang. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu meningkatkan strategi pengelolaan aset, memperbaiki sistem administrasi aset, serta memperluas sumber pendapatan daerah agar

tercipta stabilitas dan kemandirian keuangan yang lebih berkelanjutan. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan data sekunder dari laporan keuangan daerah dan belum melakukan observasi lapangan maupun perbandingan dengan daerah lain yang memiliki karakteristik serupa. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan serta melakukan studi komparatif antar daerah agar hasil penelitian menjadi lebih mendalam, komprehensif, dan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif.

Acknowledgment

-

Daftar Pustaka

- Agustina, F., Pramono, A. J., Akbar, B., & Alma'arif. (2022). Factors Determining Low Regional Financial Independence: Financial Autonomy and Degree of Decentralization. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 8(1), 117–130. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v8i1.701>
- Almira, T. N., & Sukarno, D. (2024). Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019-2022. *AL-KHARAJ*. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.2104>
- Anasta, L., & Nengsih, N. (2019). Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (pada Kabupaten dan Kota di Jawa Barat). *Profita: Komunikasi Ilmiah Dan Perpajakan*, 12(1), 50-55. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.004>
- Hamdani, M. U. A., & Hamzah, M. (2025). Analisis Trend, Estimasi dan Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kab. Probolinggo Tahun 2018-2022. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 1853-1859. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.1888>
- Hardiana, D. R. (2023). Implementasi desentralisasi fiskal dalam kebijakan transfer dana ke daerah pada realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2021. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 8(2), 321–338. <https://doi.org/10.25077/jakp.8.2.321-338.2023>
- Haryanto, J. T. (2017). Regional financial performance evaluation in the Indonesian fiscal decentralization era. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 5(3), 199–214. <https://doi.org/10.22437/ppd.v5i3.4607>
- Hendra, J. (2018). Pengaruh Partisipasi Dalam Penganggaran dan Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah:(Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo). *Assets: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, 2(1), 8-17. <https://doi.org/10.30741/assets.v2i1.218>
- Khoirunisa, I., & Sulaeman, A. S. (2022). Fiscal Decentralization: Is There a Simultaneous Relationship Between Regional Independence and Social Welfare. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 2(1). <https://doi.org/10.28986/jtaken.v2i1.848>
- Majid, A. A. (2025, April). Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Di Kota Probolinggo. *In Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)* (Vol. 4, pp. 1252-1262). <https://doi.org/10.36441/snpk.vol4.2025.453>

- Muttaqin, I., Adiranti, U., & Zakiyah, R. D. (2023). Analisis penerapan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) pada bidang perbendaharaan dan kas daerah BPPKAD Kota Probolinggo. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 9(1), 2310-2318. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol9.iss1.2023.1484>
- Nasution, T., & Rahayu, E. N. P. (2023). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Studi 2020-2022). *eCo-Fin*, 5(2), 104–110. <https://doi.org/10.32877/ef.v5i2.766>
- Pabayo, A. S. T. (2025). Impact of Fiscal Decentralization Policy on Regional Fiscal Independence in Indonesia. *Journal of Local Government Issues*, 8(1), 142–160. <https://doi.org/10.22219/logos.v8i1.37646>
- Perwitasari, D. A., Haidiputri, T. A. N., & Rustinawati, M. (2022). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Keuangan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo Periode 2020. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi*, 14(2), 41-52. <https://doi.org/10.35457/akuntabilitas.v14i2.2521>
- PPID Kota Probolinggo. (2021). Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (LRA SKPD) Pemerintah Kota Probolinggo. diakses dari <https://ppid.probolinggokota.go.id/keuangan-2/lra-skpd/>.
- PPID Kota Probolinggo. (2022). Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (LRA SKPD) Pemerintah Kota Probolinggo. diakses dari <https://ppid.probolinggokota.go.id/keuangan-2/lra-skpd/>.
- PPID Kota Probolinggo. (2023). Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (LRA SKPD) Pemerintah Kota Probolinggo. diakses dari <https://ppid.probolinggokota.go.id/keuangan-2/lra-skpd/>.
- Pratiwi, C. A., Daulay, A. N., & Jannah, N. (2025). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Dalam Mengelola Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 23(9), 11-20. <https://doi.org/10.2324/13snwt82>
- Pratommi, M. W., & Muhsyaf, S. A. (2023). Pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(4), 99-109. <https://doi.org/10.29303/risma.v3i4.955>
- Rahma, A. A., Fanida, E. H., & Fitrie, R. A. (2026). Evaluasi Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020-2025. *Journal Social Society*, 6(2), 1404–1415. <https://doi.org/10.54065/jss.6.2.2026.1281>
- Rahman, F. (2022). Pengaruh Usaha Kecil Menengah Dan Sektor Pariwisata Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Ekonomi Kreatif dan Manajemen Bisnis Digital*, 1(2), 379-392. <https://doi.org/10.55047/jekombital.v1i2.355>
- Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh pajak daerah dan retribusi terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 81-87. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.2455>
- Ridhoi, F. (2023). Implementasi Pajak Rumah Makan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Probolinggo Pada Masa Covid 19 (Peraturan Daerah Kota Probolinggo No. 2 TAHUN

- 2011). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(2), 111-118.
<https://doi.org/10.33366/jisip.v12i2.2567>
- Trisnasari, R., & Sunaningsih, S. N. (2022). Analisis kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. *Gorontalo Accounting Journal*, 18-28.
<https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1744>
- Utari, R., Nursyabani, A., In, H., Rizka, R. B., & Kurniawan, S. (2023). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dilihat dari rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen (EKO-BISMA)*, 2(2). <https://doi.org/10.58268/eb.v2i2.66>
- Waruwu, H. P. S., & Siregar, R. A. (2024). Analisis Efektivitas Kontribusi Pajak Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. *Jurnal Dunia Pendidikan*, 5(3), 926-934. <https://doi.org/10.55081/jurdip.v5i3.3535>
- Wulandari, A., Dewi, F. D., & Nusantara, A. F. P. (2025). Analisis Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Implikasinya Pada Pengelolaan Keuangan Di BPPKAD Kota Probolinggo. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(3), 758-762. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i3.185>
- Yaqin, M. A., Shofian, D. E., & Stybudi, B. (2026). Analisis Rasio Profitabilitas sebagai Alat untuk Mengukur Kinerja Keuangan pada UMKM SW Group Magelang. *Journal Social Society*, 6(1), 1–14. <https://doi.org/10.54065/jss.6.1.2026.911>